

Akulturası Agama dan Budaya dalam Struktur Pemerintahan Kerajaan Balanipa Abad 17 - 18

Muh. Farrel Islam¹, Lutfiah Ayundasari²

^{1,2} Jurusan Sejarah, Universitas Negeri Malang

Jl. Semarang No.5, SumpersariKota Malang, Jawa Timur 65145

Email: farrel.m.islam@gmail.com, lutfiah.fis@um.ac.id

Abstract: *Acculturation of Religion and Culture in the Government Structure of the 17-18th Century Balanipa Kingdom.* *Balanipa kingdom is as one of the superior kingdom in the confederation of Pitu Ulunna Salu and Pitu Babana Binanga, developed a governmental structure based on the social state of its people. Post-penetration of Islamic culture, Balanipa kingdom accommodates Islam in its governance structure by giving a special position to ulama in the efforts to enforce Islamic sharia. The purpose of this research is to describe the transformation of the governance structure of the Kingdom of Balanipa XVII – XVIII Century. This research relies on the use of credible primary and secondary data with historical method. The result of this study show that Islam is accommodated in the governance structure of the Kingdom of Balanipa through a position in a customary structure called Kali. In this position, Kali acts as an enforcer of Islamic law.*

Keywords: Balanipa, Islam, Kali

Abstrak: *Akulturası Agama dan Budaya dalam Struktur Pemerintahan Kerajaan Balanipa Abad 17 - 18.* *Di Kerajaan Balanipa sebagai salah satu kerajaan yang superior dalam konfederasi Pitu Ulunna Salu dan Pitu Babana Binanga, berkembang struktur pemerintahan yang didasarkan pada keadaan sosial masyarakatnya. Pasca-penetrasi budaya Islam, Kerajaan Balanipa mengakomodir Islam dalam struktur pemerintahannya dengan memberikan posisi khusus pada Ulama dalam upaya penegakan syariat Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan transformasi struktur pemerintahan Kerajaan Balanipa Abad XVII – XVIII. Penelitian ini bersandar pada penggunaan data-data primer dan sekunder yang kredibel dengan metode sejarah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Islam diakomodasi dalam struktur pemerintahan Kerajaan Balanipa melalui sebuah posisi dalam struktur adat yang disebut Kali. Dalam posisi ini, Kali bertindak sebagai penegak syariat Islam.*

Kata Kunci: Balanipa, Islam, Kali

Pendahuluan

Agama dan Budaya adalah dua kutub pemahaman yang seringkali diperhadapkan. Ini seringkali terjadi akibat ketidakmampuan untuk memahami realita bahwa masyarakat Islam adalah masyarakat yang terkonfigurasi dari berbagai macam kultur, etnis dan pemahaman.¹ Bahkan belakangan, banyak argumentasi yang sepertinya ingin menunjukkan bahwa budaya tidak mampu mengakomodasi nilai-nilai agama. Fenomena ini telah menciptakan kegelisahan dikalangan masyarakat tradisional yang masih menjalankan tradisinya.

Hal ini bertolak belakang dengan fakta sejarah yang telah memberikan banyak contoh tentang akulturası budaya dan agama dalam kehidupan masyarakat. Per-

jumpaan budaya dan tradisi lokal dengan agama Islam di masa silam tidak membuat penganut tradisi atau kepercayaan lokal tergusur baik dalam aspek kultural maupun sistem kemasyarakatan. Justru, agama Islam dan tradisi lokal berjumpa dalam sistem yang mampu menginternalisasi nilai-nilai agama bersanding dengan tradisi lokal.

Perjumpaan budaya lokal dan agama Islam dimulai dengan kedatangan penyebar Islam. Christian Pelras dalam bukunya *The Bugis*, mencatat Islamisasi di Sulawesi bermula dengan kedatangan tiga ulama dari Minangkabau, yaitu Dato ri Bandang, Dato ri Patimang dan Dato ri Tiro. Ketiga ulama ini mengislamkan Datu Luwu dalam bulan Februari 1605, serta Raja Tallo dan

Raja Gowa dalam bulan November 1605. Setelah Raja Tallo memeluk Islam, didirikan sebuah masjid di Tallo sebagai tempat beribadah untuk umat Islam di wilayah itu.²

Islamisasi ini kemudian berlanjut ke pantai barat pulau Sulawesi. Kawasan ini adalah wilayah persekutuan kerajaan-kerajaan lokal yang disebut Pitu Ulunna Salu atau tujuh kerajaan di pegunungan dan Pitu Babana Binanga atau tujuh kerajaan di pesisir³ wilayah ini kemudian disebut Mandar. Persekutuan tujuh kerajaan pesisir ini diinisiasi oleh Kerajaan Balanipa dibawah kepemimpinan Mara'dia (raja) Balanipa ke-2 bernama Tomepayung dalam Assitalliang Tamajarra I (Perjanjian Tamajarra pertama) sebagai ikrar atau pengakuan persekutuan tujuh kerajaan pesisir (Pitu Babana Binanga). Kerajaan ini antara lain Balanipa, Sendana, Banggae, Pamboang, Tappalang, Mamuju dan Binuang.⁴

Kerajaan Balanipa menjadi kerajaan yang pertama tersentuh Islam di kawasan Mandar. Islamisasi di Balanipa ini dituangkan dalam catatan seorang mantan Asisten Residen di Mandar bernama W.J. Leyds. Dalam catatan Leyds disebutkan bahwa orang Mandar meyakini Islam masuk di Mandar setelah Gowa dan Sawitto yang terlebih dahulu memeluk Islam, Islamisasi ini diperkirakan terjadi dalam tahun 1610-1620 pada pemerintahan Daetta.⁵

Daetta Tommuane atau yang lebih dikenal dengan sebutan Kanna Ipattang adalah Mara'dia ke-4 dari Kerajaan Balanipa. Islamisasi di masa pemerintahan Kanna Ipattang ini juga dikonfirmasi dalam naskah Lontara' Mandar yang mencatat tentang kedatangan ulama yang bergelar Tosalama di Binuang, ulama ini kemudian mengislamkan Kanna Ipattang Mara'dia Balanipa.⁶

Penelitian ini akan melihat akulturasi sebagai Mekanisme Perubahan Kebudayaan. Akulturasi sendiri akan terjadi apabila terdapat dua kebudayaan atau lebih yang berbeda namun saling berinteraksi dan saling berproses, proses ini memasukkan unsur kebudayaan asing kedalam kebu-

dayaan asli tanpa menghilangkan identitas dan orosinalitasnya.⁷ Dalam konteks penelitian ini, struktur pemerintahan Kerajaan Balanipa pra-islamisasi diposisikan sebagai kebudayaan asli dan penetrasi budaya Islam diposisikan sebagai kebudayaan asing yang memasukkan unsur-unsur kebudayaannya dalam sistem dan struktur pemerintahan Kerajaan Balanipa.

Dalam penelitian-penelitian sebelumnya, Kerajaan Balanipa telah dilihat dari berbagai perspektif. Penelitian ini dilakukan oleh Muliadi yang membahas tentang Kontribusi Kerajaan Balanipa terhadap Islamisasi di Mandar, penelitian ini berfokus pada peranan Kerajaan Balanipa dalam Islamisasi di Mandar. Penelitian tentang Kerajaan Balanipa dalam masa Islam juga pernah dilakukan Oleh Ilyas dalam Skripsinya di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang meneliti Islamisasi di Kerajaan Balanipa Pada Abad XVI-XVII, dalam penelitiannya ini, Ilyas lebih fokus pada proses Islamisasi di Kerajaan Balanipa. Penelitian lainnya yang lebih umum tentang Kerajaan Balanipa dilakukan oleh Nur Iqmal (2016) dalam Skripsinya di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang meneliti tentang Kerajaan Balanipa Pada Abad XVI-XVII, penelitiannya ini melihat Kerajaan Balanipa dalam perspektif yang lebih luas.

Dalam penelitian ini, penulis memilih metode sejarah. Pemilihan metode ini didasarkan pada kesesuaian Langkah-langkah penelitian dengan topik kajian yaitu akulturasi agama dan budaya dalam struktur pemerintahan Kerajaan Balanipa Abad 17-18. Metode ini membantu penulis dalam merekonstruksi Kembali proses islamisasi dan transformasi struktur pemerintahan di Kerajaan Balanipa di abad 17 hingga abad 18. Hal ini dapat ditinjau dari proses analisis, penarikan sintesis hingga interpretasi. Harapannya, dengan metode ini, rekonstruksi historis dalam kajian dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan kaidah keilmuan sejarah.

Langkah-langkah penelitian dengan metode sejarah yang dijabarkan Kuntowijoyo⁸

secara sistematis penulis lakukan mulai dari (1) pemilihan topik, (2) heuristik, (3) kritik atau verifikasi sumber, (4) interpretasi, dan (5) historiografi. Dalam kajian ini, penulis menggunakan sumber primer dan sumber sekunder, berupa naskah lontar yang sudah ditransliterasi, foto, buku dan artikel dalam jurnal yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Selain itu, dalam kajian ini penulis berupaya melihat transformasi struktur pemerintahan ini dalam perspektif akulturasi budaya, sehingga diharapkan dapat didapatkan gambaran utuh terkait proses transformasi struktur pemerintahan itu sendiri.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini akan melihat perubahan struktur dan sistem pemerintahan Kerajaan Balanipa pasca-penetrasi budaya Islam. Penetrasi budaya Islam kedalam struktur dan sistem pemerintahan Kerajaan Balanipa ini akan dibaca sebagai akulturasi budaya. Hasil atau titik temu dari akulturasi budaya ini akan menjadi strong point dan novelty yang belum disentuh oleh kajian historis tentang Kerajaan Balanipa sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk 1) menjelaskan struktur dan sistem pemerintahan Kerajaan Balanipa pra-Islam, 2) menjelaskan proses Islamisasi Kerajaan Balanipa, dan 3) menjelaskan titik temu antara sistem tradisional Kerajaan Balanipa dan Kebudayaan Islam.

Pembahasan **Struktur Pemerintahan Kerajaan Balanipa**

Sebelum memasuki periode kerajaan, wilayah-wilayah di kawasan Pantai Barat Pulau Sulawesi ini dipimpin oleh para pemimpin lokal. Para pemimpin lokal ini disebut Tomakaka, yang memimpin suatu wilayah atau banua. Kepemimpinan Tomakaka ini mewadahi homogenitas dalam suatu kelompok masyarakat. Periode awal kepemimpinan Tomakaka ini dapat disebut sebagai masa kehidupan masyarakat yang homogen dalam suatu wilayah tertentu dan belum terintegrasi dengan kelompok-kelompok masyarakat lainnya.

Oleh karena itu, Darmawan Mas'ud Rahman mendefinisikan Tomakaka sebagai sosok pemimpin yang sanggup menyelesaikan segala permasalahan rakyat melalui sifatnya yang pengayom⁹.

Tomakaka sendiri telah menunjukkan eksistensinya sebelum Kerajaan Balanipa lahir. Napo, Samasundu, Mosso dan Tododang adalah wilayah-wilayah yang dipimpin oleh Tomakaka sebelum periode pemerintahan Mara'dia¹⁰. Empat wilayah ini kemudian mengintegrasikan diri dalam ikatan Appe Banua Kayyang atau Empat Negeri Besar, yang menjadi cikal bakal Kerajaan Balanipa. Pemerintahan dibawah kekuasaan Tomakaka ini kemudian menghadapi perubahan-perubahan sosial sebagai implikasi dari kebutuhan sosial yang semakin kompleks. Sebagai pemegang kekuasaan tunggal, Tomakaka semakin tidak mampu mengendalikan dan mengatur semua urusan komunitas masyarakat yang dipimpinnya sehingga dimulailah pembagian wewenang dengan menunjuk tokoh tertentu untuk menangani urusan yang sifatnya fundamental. Oleh karena itu, dipilihlah pejabat yang disebut Tomabubeng (Orang tua) yang mengatur masalah lahan. Selain itu, dipilih pejabat yang disebut So'bo, yaitu pemegang otoritas yang menangani masalah tanaman. Belakangan, dibentuk lagi jabatan Andong-guru yang bertugas mengajarkan berbagai keterampilan, serta jabatan Ponggawa dan Poambi yang masing-masing menangani masalah ekonomi dan ritual masyarakat¹¹.

Kompleksitas permasalahan yang dihadapi para Tomakaka disiasati dengan pen-delegasian sebagian kewenangannya pada jabatan-jabatan baru dalam struktur adat. Dalam tahapan ini, nampaknya kekuasaan Tomakaka telah terdistribusi pada sektor yang vital seperti urusan lahan, tanaman, keterampilan hidup, perekonomian dan ritual. Distribusi kekuasaan ini telah menggerogoti kekuasaan dan pengaruh Tomakaka dalam kehidupan komunitas masyarakat yang dipimpinnya. Kekuasaan dan pengaruh baru yang dominan justru muncul dari jabatan-jabatan baru dalam

struktur adat. Tomabubeng, So'bo, Andongguru, Ponggawa, dan Poambi menjadi jabatan baru yang memiliki kekuasaan dan pengaruh baru yang mereduksi pengaruh Tomakaka.

Pembagian kekuasaan Tomakaka dalam pada jabatan-jabatan dengan tugas yang strategis dalam kehidupan masyarakat Empat Negeri Besar belum mampu menjawab tantangan yang dihadapi. Justru, dengan memudarnya pengaruh Tomakaka, orientasi kehidupan masyarakat semakin tidak jelas. Keadaan ini membutuhkan kepemimpinan yang terpusat kembali pada seseorang pemimpin baru yang kemudian diidentifikasi sebagai pappuangan atau seseorang yang disapa puang¹². Transformasi tipologi kepemimpinan dari Tomakaka menjadi Pappuangan ini kemudian merubah tipologi kepemimpinan di Empat Negeri Besar menjadi Pappuangan Napo, Pappuangan Samasundu, Pappuangan Mosso dan Pappuangan Todatodang.

Kompleksitas permasalahan yang dihadapi akhirnya mencapai klimaknya pada persoalan keamanan. Empat Negeri Besar menghadapi ancaman dari Tomakaka disekitar wilayahnya. Oleh karena itu, Appe Banua Kayyang atau Empat Negeri Besar meminta Pappuangan Mosso untuk menjemput salah seorang keturunan Pappuangan Napo di Kerajaan Gowa yang sedang menjadi panglima perang untuk membantu Empat Negeri Besar menghadapi ancaman dari luar¹³. Sosok panglima perang Kerajaan Gowa ini bernama I Manyambungi yang kelak menjadi Mara'dia atau Raja Balanipa yang pertama.

Kedatangan I Manyambungi di Napo menjadi harapan atas keberlangsungan eksistensi Empat Negeri Besar yang sedang menghadapi ancaman dari agresifnya Tomakaka Passokkorang¹⁴. Pasca-kedatangan I Manyambungi, dia berhasil menumpas agresifnya kekuasaan Tomakaka dari Passokkorang dan mengakhiri dominasi Tomakaka tersebut. Berakhirnya ancaman dari agresifitas kekuasaan Passokkorang ini sekaligus menjadi tanda dimulainya transformasi tipologi kepemimpinan

yang baru yaitu lahirnya kepemimpinan Mara'dia¹⁵.

Setelah menaklukkan Passokkorang, I Manyambungi diangkat menjadi Mara'dia oleh Empat Negeri Besar sebagai penghormatan atas jasanya yang telah menyelamatkan negeri dari ancaman aneksasi. Pengangkatan I Manyambungi sebagai Mara'dia atau raja dari Empat Negeri Besar ditandai dengan penanaman pohon nipa yang dikelilingi pagar, oleh masyarakat setempat penanaman pohon nipa dengan cara ini disebut dengan "Balanipa" (lihat foto 1). Dengan demikian, resmilah I Manyambungi menjadi Raja di kawasan "Balanipa" dengan gelar Mara'dia Balanipa yang mengacu pada pohon nipa yang ditanam¹⁶.

Penegasan struktur Kerajaan Balanipa baru dilakukan oleh Mara'dia Balanipa ke-2 yaitu Tomepayung, anak dari I Manyambungi. Dalam masa pemerintahan Tomepayung, Pappuangan dari Empat Negeri Besar dijadikan sebagai Lembaga Adat tertinggi yang mengangkat dan memberhentikan Mara'dia. Tomepayung juga membentuk sepuluh lembaga adat (Sappulo Sokkoq Adaq) yang akan membantu tugas Mara'dia yaitu 1) Pa'bicara Kayyang dalam urusan hukum, 2) Pa'bicara Kenje dalam urusan administrasi pemerintahan dan penghubung Mara'dia dengan anggota adat, 3) Pappuangan Limboro sebagai ketua kaum adat dan urusan diluar istana, 4) Pappuangan Biring Lembang dalam urusan keamanan laut, 5) Pappuangan Lambe dalam urusan eksternal Kerajaan, 6) Pappuangan Koyang dalam urusan perbendaharaan, 7) Pappuangan Laka dalam urusan dengan kawasan pegunungan, 8) Pappuangan Rui dalam urusan penerangan, 9) Pappuangan Tenggelang dalam urusan hutan dan pertanian serta 10) Pappuangan Luyo dalam urusan penghubung antara Balanipa, Pesisir dan Pegunungan. Tomepayung juga membentuk jabatan dalam urusan Industri rakyat yang diisi oleh sepuluh pengerajin atau Sappulo sakka manarang. Selain itu juga dibentuk angkatan perang yang disebut Appe Jannangang atau em-

pat angkatan yang terdiri dari pasukan infanteri (pakkambusu'), pasukan senapan (passinapang), pengawal istana (joa' ma-toa) dan pasukan sumpit (pa'burassang), keempat pasukan ini semuanya berada dibawah komando Mara'dia Malolo (Panglima Perang) yang masih keluarga dekat Mara'dia Balanipa¹⁷.

Tiga topologi kepemimpinan di Balanipa yang bergulir dari fase kepemimpinan Tomakaka, menuju fase Pappuangan hingga fase Mara'dia menunjukkan adanya kontinuitas dalam struktur pemerintahannya. Kontinuitas ini dilihat dari eksistensi pemimpin setiap banua atau wilayah yang tidak pernah hilang dalam struktur adat. Posisi Tomakaka Napo, Samasundu, Mosso dan Todatodang tetap eksis setelah muncul tipologi kepemimpinan Pappuangan. Dalam tipologi kepemimpinan Pappuangan, Tomakaka Napo, Samasundu, Mosso dan Todatodang menjadi Pappuangan. Demikian juga setelah menghadapi kekacauan akibat upaya aneksasi dari Tomakaka Pasokkorang yang memunculkan tipologi kepemimpinan Mara'dia, Pappuangan Napo, Samasundu, Mosso dan Todatodang tetap menjadi bagian tidak terpisahkan dari adat Balanipa, bahkan Empat Negeri Besar ini menjadi Lembaga Adat tertinggi di Balanipa yang mengangkat dan memberhentikan Mara'dia. Dengan demikian telah jelas bahwa struktur adat Kerajaan Balanipa terdiri dari Mara'dia dan perangkat hadatnya yang dibentuk oleh Mara'dia sendiri dan Lembaga Adat yang merupakan otoritas kekuasaan yang memberikan kekuasaan kepada Mara'dia.

Islamisasi Kerajaan Balanipa

Dalam proses transformasi tipologi kepemimpinan di wilayah Balanipa, tidak ada sumber-sumber tertulis dalam naskah lokal terkait dengan sistem kepercayaan masyarakat Balanipa. Namun, melalui sisa-sisa tradisi kepercayaan lokal yang masih eksis di bekas kawasan Kerajaan Balanipa sekarang, dapat diidentifikasi kepercayaan yang berkembang di Balanipa sebelum masuknya Islam. Kepercayaan

Animisme dan Dinamisme masih ditemukan di kawasan ini, kepercayaan terhadap adanya kuasa orang yang sudah mati untuk memengaruhi kesehatan orang yang masih hidup masih ditemukan di daerah Mandar, pada umumnya untuk menggambarkan keadaan ini, digunakan istilah amba'ambarang (sakit akibat pengaruh orang yang sudah mati). Selain itu, adanya perlakuan khusus terhadap binatang seperti Buaya dan Tikus juga masih ditemukan, pada malam hari Buaya harus disebut dengan To Diuwai (Penghuni air) dan Tikus harus disebut Daeng Makkio, sebutan khusus ini dimaksudkan agar kedua hewan ini tidak mengganggu aktivitas manusia¹⁸.

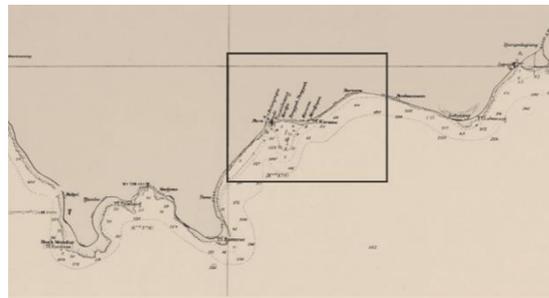


Foto 1. Balanipa dalam Peta Kolonial

Sumber: digitalcollections.universiteitleiden.nl

Bukti tertulis terkait kepercayaan yang berkembang di Balanipa mulai ditemukan setelah Islam masuk di Kerajaan Balanipa. Dari catatan ini juga diketahui bahwa Islam masuk di Balanipa pada masa pemerintahan Kanna Ipattang. Hal ini ditemukan dalam Lontara Mandar sebagai berikut:

"Pannassai toi iyamo diqe upannassai pau-pauanna, nanna todilota, disanga Kanna Ipattang, appona Todilaling, anana Todijalloq. Apa matei amanna, Mara qdiami Kanna Ipattang. Talluppariamai Mara qdia di Balanipa anna polemo Tosalama q di Benuang, todilai q di Lita q Makka, Talaqbong nala lopi, teqeng bassi nala tokong. Iyamo Mappasallang Idaeng Mapattang, sallammi mara qdia siola to Balanipa inggannana Banua Kayyang Napo, Samasundu, Mosso, Todatodang¹⁹".

Terjemahan: "Inilah yang menjelaskan perkataan yang ditetapkan orang terdahulu kita bernama Kanna Ipattang, cucu

Todilaling, anak Todijalloq. Setelah ayahnya mati, Kanna Ipattang menjadi raja. Tiga tahun dia jadi raja di Balanipa, datanglah Tosalamaq di Benuang dari Mekah. Kelopak mayang menjadi perahunya dan tongkat besi menjadi dayungnya. Dialah yang mengislamkan Daeng Mapattang bersama seluruh negeri besar di Balanipa yaitu Napo, Samasundu, Mosso dan Todatodang”

Lontar Mandar ini memberikan penjelasan penting tentang Islamisasi di Balanipa dalam masa pemerintahan Kanna Ipattang. Dalam Lontar ini disebutkan Tosalamaq di Benuang sebagai penganjur agama Islam di Kerajaan Balanipa yang berhasil mengislamkan Mara'dia Balanipa Kanna Ipattang dan empat negeri besar di Balanipa yaitu Napo, Samasundu, Mosso dan Todatodang. Ini berarti, pola Islamisasi di Balanipa adalah top down, yaitu Islamnya seorang raja diikuti langsung oleh seluruh rakyat dalam negerinya. Hal ini tercermin dari Islamnya empat negeri besar di Balanipa setelah Kanna Ipattang memeluk Islam.

Sumber lainnya yang menerangkan Islamisasi Balanipa ditemukan dalam catatan W.J. Leyds, seorang asisten residen yang pernah bertugas di Mandar. Catatan Leyds ini mencantumkan perkiraan tahun Islamisasi di Mandar. Leyds mencatat bahwa Islamisasi di Mandar berlangsung dalam tahun 1610-1620 pada era pemerintahan Daetta atau Kanna Ipattang²⁰. Catatan Leyds ini turut menguatkan catatan dalam Lontar Mandar bahwa Islamisasi Balanipa terjadi pada masa kepemimpinan Kanna Ipattang, yaitu dalam rentang tahun 1610 hingga 1620.

Penganjur agama Islam yang datang ke Balanipa dalam masa kepemimpinan Kanna Ipattang menurut Lontar Mandar adalah Tosalamaq di Benuang. Lontar Mandar tidak menuliskan nama tokoh yang mengislamkan Kanna Ipattang Mara'dia Balanipa, Lontar Mandar hanya mencatat gelar Tosalamaq di Benuang (orang yang diberi keselamatan di Binuang). Namun, tokoh ini kemudian teridentifikasi dalam Lontara

2 Pattodioloang di Mandar sebagai Syaikh Abdurrahim Kamaluddin²¹.

Belum jelas dengan cara atau pendekatan seperti apa yang dilakukan oleh Syaikh Abdurrahim Kamaluddin berhasil mengislamkan Kanna Ipattang. Tetapi, dengan Islamnya rakyat di empat negeri besar dalam Kerajaan Balanipa menandakan bahwa Islam menjadi agama resmi Kerajaan Balanipa. Bahkan dalam perkembangannya, Kanna Ipattang memfasilitasi pengembangan dan pendidikan Islam di dalam Kerajaan Balanipa. Hal ini tercermin dalam Keputusan Mara'dia Balanipa tentang pemberian perlakuan khusus terhadap pendidikan Islam di Balanipa sebagai berikut:

“Naiya mukim tannaindoi allo, tannaimbui iri', tandipandengngei, tandi pambulle-bullei, tandipa' jagai, tandipannangi, Madondong duambongi anna lopai lita, maloli dai do timor tarruppu, maloli naun di wara tarruppu²²”.

Terjemahan: “Keberadaan mukim tidak terkena sinar matahari, tidak diterpa angin, tidak diberatkan pekerjaan, tidak diminta memikul, tidak diminta berjaga, tidak dipajak. Besok lusa manakala ada kekacauan, ia bergerak ke timur tidak akan pecah, bergerak kebarat tidak akan pecah”

Mukim yang disebut dalam keputusan Kanna Ipattang Mara'dia Balanipa adalah wadah pendidikan Islam yang memiliki kesamaan dengan pola pendidikan Pesantren. Wadah pendidikan ini disebut Mukim di Tangnga-tangnga. Menurut Ilyas²³ dalam skripsinya Islamisasi di Kerajaan Balanipa Abad XVI-XVII bahwa Mukim ini berfungsi sebagai tempat untuk mempelajari Al-Qur'an dan praktik serta tata cara beribadah sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Oleh karena itu, Mukim mendapatkan perlakuan khusus dari Daetta Tommuane berupa pembebasan pajak, dan jaminan keamanan.

Islamnya Daetta Tommuane tidak hanya berdampak positif terhadap perkembangan pendidikan Islam melalui pendirian Mukim dibawah arahan Syaikh Abdurrahim Kamaluddin. Namun, penerapan syariat Islam juga dilakukan, hal ini dicatat

dalam Lontar Mandar yang menerangkan tentang penanan Syaikh Abdurrahim Kamaluddin dalam mengajarkan syahadat, puasa, zakat, shalat, berwudhu, beristinja dan mendirikan shalat Jum'at di Kerajaan Balanipa. Selain itu, dalam Lontar Mandar yang dialihaksarakan oleh Mandra ini juga mencatat tentang pernikahan Kanna Ipat-tang yang dilaksanakan mengikuti syariat Islam yang diajarkan oleh Syaikh Abdurrahim Kamaluddin²⁴.

Titik Temu antara Struktur Adat Kerajaan Balanipa dengan Kebudayaan Islam

Peranan penting Syaikh Abdurrahim Kamaluddin yang dicatat dalam Lontar Mandar menunjukkan penetrasi Islam di Kerajaan Balanipa yang sangat kuat. Perkembangan Islam di Balanipa yang kuat menandakan adanya penerimaan Islam baik secara kultural maupun secara struktural dalam masyarakat Kerajaan Balanipa dibawah kepemimpinan Kanna Ipat-tang. Penerimaan ini tercermin dari keleluasaan Syaikh Abdurrahim Kamaluddin untuk mendirikan Mukim sebagai sarana pendidikan Islam yang mendapat jaminan dari Mara'dia Balanipa. Selain mendapatkan keleluasaan untuk mengembangkan Islam di Balanipa, pelembagaan syariat Islam juga diberikan ruang oleh Mara'dia Balanipa melalui pengakomodasian ulama dalam struktur kekuasaan sebagai upaya penegakan syariat Islam.

Pelembagaan syariat Islam di Kerajaan Balanipa diwujudkan dengan membentuk sebuah jabatan dalam struktur pemerintahan dengan sebutan Kali Balanipa. Jabatan Kali (Qadhi) Balanipa adalah posisi baru dalam struktur pemerintahan Kerajaan Balanipa yang dibentuk pasca-penetrasi Islam. Secara fungsional, sebelum jabatan ini resmi terbentuk dalam struktur pemerintahan, tugas terkait penegakan syariat Islam dijalankan oleh Syaikh Abdurrahim Kamaluddin. Namun, secara struktural, jabatan Kali Balanipa pertama kali dijabat oleh santri Mukim Syaikh Abdurrahim Kamaluddin bernama I Tamerus²⁵.

Jabatan Kali Balanipa ini memiliki posisi yang penting dalam struktur adat Kera-

jaan Balanipa. Kali Balanipa berada pada pelapisan sosial kedua setelah lapisan pertama yang ditempati oleh golongan Raja dan kerabatnya. Lapisan sosial kedua ini disebut dengan Tau Piya (orang pilihan). Dalam lapisan sosial ini, posisi Kali Balanipa sejajar dengan Paqbicara dan Pappuan-gang yang merupakan perangkat Adat yang berada langsung dibawah kendali Mara'dia²⁶. Oleh karena itu, Kali Balanipa seringkali disebut Puang Kali atau Pukkali Balanipa (lihat foto 2).

Selain memiliki posisi khusus dalam struktur adat, Kali Balanipa juga diberikan kewenangan yang luas. Hal ini dicatat dalam Lontara Pattodioloang Mandar sebagai berikut:

"Anna iyya anggannana nangean ada' Daetta, ingganna toi tia nangean sara' I tuan di binuang. Inggannana nawicara Daetta ingganna toi tia nawicara to map-pasallang²⁷".

Terjemahan: Dan seluruh tempat tegaknya adat Daetta, seluruh tempat itu pula tegak Syari'at Tuan di Binuang. Seluruh kekuasaan Daetta, sebanyak itu pula kekuasaan orang yang mengislamkannya.



Foto 2. Pukkali Balanipa paling Kanan Bersama Raja Balanipa yang baru dilantik
Sumber: www.ridwanmandar.com

Catatan dalam Lontara Pattodioloang Mandar ini memberikan gambaran bahwa tegaknya syariat Islam di Balanipa berkese-suaian dengan kekuasaan Mara'dia Balanipa. Dalam hal ini, kekuasaan Mara'dia Balanipa berjalan seiring dengan penegakan syariat dibawah bimbingan Syaikh Abdurrahman Kamaluddin (Tosalamaq di Benuang/Tuan di Binuang). Hal ini juga

menunjukkan luasnya kewenangan para penegak syariat Islam di Balanipa. Oleh karena itu, kesesuaian antara kekuasaan Mara'dia dengan penegakan syariat Islam disebut Adaq Makkesara', Sara' Makkeadaq yang secara harfiah berarti adat bersanding syariat dan syariat bersanding adat²⁸.

Pelebagaan syariat Islam di Balanipa melalui pengakomodasian ulama dalam struktur adat dapat dibaca sebagai bentuk akulturasi antara budaya asli Balanipa sebelum masuknya Islam dengan syariat Islam sebagai budaya eksternal yang melakukan penetrasi secara struktural dan kultural di Balanipa, tetapi akulturasi ini tidak merubah struktur adat sebelumnya, melainkan hanya membuka ruang baru dalam struktur adat yang diberi kewenangan dalam penegakan syariat Islam. Hal ini sejalan dengan penjelasan Kodiran²⁹ bahwa akulturasi terjadi apabila dua kebudayaan atau lebih saling berinteraksi atau berproses, proses ini memasukkan unsur kebudayaan asing kedalam kebudayaan asli tanpa mengubah identitas ataupun orisinalitasnya. Bentuk akulturasi budaya lokal di Balanipa dengan budaya Islam adalah pemberian ruang bagi ulama dalam jabatan Kali Balanipa.

Jabatan Kali Balanipa adalah titik temu dalam proses penyerapan nilai-nilai keislaman di Balanipa. Meskipun jabatan Kali masuk dalam struktur pemerintahan Kerajaan Balanipa, jabatan-jabatan lama dalam struktur pemerintahan Balanipa pra-Islam tetap bertahan dan tidak kehilangan wewenangnya masing-masing. Hanya saja, seiring dengan perkembangan agama Islam yang pesat, pejabat Kali Balanipa tidak lagi hanya diposisikan sejajar dengan perangkat adat Kerajaan Balanipa seperti Sappulo Sokkoq Adaq, tetapi mulai disejajarkan dengan Mara'dia. Kali sebagai Mara'dia Sara' (hukum Islam) dan Mara'dia Balanipa sebagai Mara'dia Banua atau raja.

Kali Balanipa tidak lagi hanya diposisikan sejajar dengan perangkat adat Kerajaan Balanipa seperti Sappulo Sokkoq Adaq, tetapi mulai disejajarkan dengan

Mara'dia. Kali sebagai Mara'dia Sara' (hukum Islam) dan Mara'dia Balanipa sebagai Mara'dia Banua atau raja. Pemberian ruang jabatan Kali Balanipa dalam struktur adat ini merupakan sebuah implikasi logis dari diterimanya Islam sebagai agama resmi di Kerajaan Balanipa. Kali Balanipa menjadi kiblat masyarakat Balanipa dalam menjalankan ibadah dan ritual keagamaan karena terbatasnya orang yang memahami syariat dan cabang-cabang keilmuan Islam lainnya. Dengan keadaan ini, jabatan Kali Balanipa dibuka sebagai otoritas tunggal dalam menangani berbagai problematika keislaman di Kerajaan Balanipa. Dijelaskan oleh Syahrir Kila³⁰ bahwa perayaan hari penting dalam kalender Islam seperti awal puasa, lebaran dan peringatan maulid Nabi harus dikonsultasikan terlebih dahulu pada Kali Balanipa. Oleh karena itu, jabatan Kali Balanipa merupakan titik temu untuk menjembatani konversi kepercayaan lokal menuju agama Islam.

Kesimpulan

Struktur Pemerintahan Kerajaan Balanipa lahir dari proses panjang. Proses ini direntang dalam pencarian tipologi kepemimpinan yang sesuai dengan kebutuhan sosial masyarakatnya. Mulai dari tipologi kepemimpinan Tomakaka, Pappuan, hingga tipologi kepemimpinan Mara'dia yang eksis hingga masa kemerdekaan. Transformasi kepemimpinan ini berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya yang semakin kompleks. Titik yang dianggap paling ideal dalam sejarah Kerajaan Balanipa adalah pembentukan Sepuluh Lembaga Adat (Sappulo Sokkoq Adaq) pada masa kepemimpinan Tomepayung Mara'dia Balanipa kedua. Hal ini menandai terbentuknya struktur kepemimpinan dengan pembagian tugas yang jelas, sehingga kekuasaan Mara'dia tidak absolut.

Perubahan struktur adat selanjutnya terjadi setelah datangnya Islam di Balanipa. Dalam masa kepemimpinan Kanna Ipatang Mara'dia Balanipa keempat, datang seorang penganjur agama Islam yang di-

catat dalam naskah-naskah Lontar sebagai Syaikh Abdurrahim Kamaluddin. Tokoh ini yang mengislamkan Kanna Ipattang dan seluruh rakyat Balanipa. Dengan terbatasnya saluran pendidikan Islam, didirikan sarana pendidikan yang disebut Mukim dibawah jaminan Mara'dia. Mukim ini memiliki pola pendidikan seperti di pesantren. Pendiriannya ditujukan sebagai sarana pendidikan Islam di Balanipa.

Terbatasnya ulama sebagai tempat untuk mendapat pengetahuan tentang Islam membuat Mara'dia Balanipa membuka ruang dalam struktur adat untuk jabatan baru yaitu Kali Balanipa. Jabatan Kali Balanipa ini menjadi kiblat umat Islam Balanipa untuk menanyakan persoalan peribadatan dan ritual keagamaan, keadaan ini adalah implikasi logis dari diterimanya Islam sebagai agama resmi Kerajaan Balanipa. Oleh karena itu, jabatan Kali Balanipa menjadi titik temu untuk menjembatani kepercayaan lokal menuju agama Islam didalam kontrol adat Kerajaan Balanipa.

Catatan akhir

¹Haryanto, Joko Tri "Relasi Agama dan Budaya dalam Hubungan Intern Umat Islam" 41.

²Pelras, The Bugis, 135.

³Karim, Abdul "Refleksi Ke-Indonesiaan: Kajian Sistem Pemerintahan Kerajaan Balanipa Abad XVI-XVII" 5.

⁴Muliadi "Kontribusi Kerajaan Balanipa Terhadap Islamisasi di Mandar" 44-45.

⁵Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa: Abad XVI sampai Abad XVII, 112.

⁶Mandra, Lontar Mandar, 143.

⁷Kodiran, Akulturasi sebagai Mekanisme Perubahan Kebudayaan, 87.

⁸Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah, 70-82

⁹Rahman, Puang dan Daeng: Sistem Nilai Budaya Orang Balanipa-Mandar, 112.

¹⁰Iqmal "Kerajaan Balanipa pada Abad XVI-XVII M", 16.

¹¹Kila, Budaya Politik Kerajaan Balanipa Mandar, 24.

¹²Rahman, Puang dan Daeng: Sistem Nilai Budaya Orang Balanipa-Mandar,

117.

¹³Ilyas "Islamisasi di Kerajaan Balanipa pada Abad XVI-XVII, 39.

¹⁴Iqmal "Kerajaan Balanipa pada Abad XVI-XVII M", 16.

¹⁵Karim, Abdul "Refleksi Ke-Indonesiaan: Kajian Sistem Pemerintahan Kerajaan Balanipa Abad XVI-XVII" 8.

¹⁶Kila, Budaya Politik Kerajaan Balanipa Mandar, 32.

¹⁷Rahman, Puang dan Daeng: Sistem Nilai Budaya Orang Balanipa-Mandar, 186-187.

¹⁸Muliadi "Kontribusi Kerajaan Balanipa Terhadap Islamisasi di Mandar" 48.

¹⁹Mandra dkk., Lontar Mandar, 58.

²⁰Sewang, Islamisasi Kerajaan Gowa: Abad XVI sampai Abad XVII, 112.

²¹Ilyas "Islamisasi di Kerajaan Balanipa pada Abad XVI-XVII, 50.

²²Poelinggomang, Sejarah dan Budaya Sulawesi Barat, 92.

²³Ilyas "Islamisasi di Kerajaan Balanipa pada Abad XVI-XVII, 51.

²⁴Mandra dkk., Lontar Mandar, 58.

²⁵Muliadi "Kontribusi Kerajaan Balanipa Terhadap Islamisasi di Mandar" 48; Kila, Budaya Politik Kerajaan Balanipa Mandar, 53.

²⁶Kila "Strata Sosial Masyarakat Balanipa (Studi atas Ketatanegaraan Islam)" 65; Musaddad, Annangguru Dalam Perubahan Sosial di Mandar, 83.

²⁷Syah, Lontarak Pattodioloang I Mandar, 50.

²⁸Musaddad, Annangguru Dalam Perubahan Sosial di Mandar, 82.

²⁹Kodiran, "Akulturasi sebagai Mekanisme Perubahan Kebudayaan" 87.

³⁰Kila, Budaya Politik Kerajaan Balanipa Mandar., Budaya Politik Kerajaan Balanipa Mandar, 54.

Referensi

Haryanto, J.T. "Relasi Agama Dan Budaya Dalam Hubungan Intern Umat Islam." Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi) 1, no. 1 (2015).

Ilyas. "Islamisasi Di Kerajaan Balanipa Pada Abad XVI-XVII." Skripsi Universi-

- tas Islam Negeri Alauddin. Tidak diterbitkan, 2015.
- Iqmal, Nur. "Kerajaan Balanipa Pada Abad XVI-XVII M." Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin. Tidak diterbitkan, 2016.
- Karim, Abdul. "Refleksi Ke-Indonesiaan: Kajian Sistem Pemerintahan Kerajaan Balanipa Abad XVI-XVII." *Jurnal Pangerang* 5, no. 1 (2019): 86-101.
- Kila, Syahrir. *Budaya Politik Kerajaan Balanipa Mandar*. Makassar: Pustaka Refleksi, 2016.
- Kodiran. "Akulturasi Sebagai Mekanisme Perubahan Kebudayaan." *Jurnal Humaniora* 8 (1998): 87-91.
- Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2016.
- Mandra, A.M, M Yusuf, Hapipa, Wahyuddin, and Tabritaviv. *Lontar Mandar*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991.
- Muliadi. "Kontribusi Kerajaan Balanipa Terhadap Islamisasi Di Mandar." Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin. Tidak diterbitkan, 2013.
- Musaddad, Aco. *Annangguru Dalam Perubahan Sosial Di Mandar*. Polewali Mandar: Gerbang Visual, 2018.
- Pelras, Christian. *The Bugis*. Cambridge: Blackwell Publishers, 1996.
- Poellinggomang, E.L. *Sejarah Dan Budaya Sulawesi Barat*. Makassar: Balai Pelestarian Nilai Budaya Makassar, 2012.
- Rahman, Darmawan Mas'ud. *Puang Dan Daeng: Sistem Nilai Budaya Orang Balanipa-Mandar*. Makassar: Yayasan Menara Ilmu, 2015.
- Sewang, Ahmad M. *Islamisasi Kerajaan Gowa: Abad XVI Sampai Abad XVII*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2005.
- Syah, M.T.A. *Lontarak I Pattodioloang Mandar*. Ujung Pandang: Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan Taruna Remaja, 1993.